

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sesungguhnya pendidikan diterapkan di setiap sendi kehidupan umat manusia, dengan kata lain pendidikan berlangsung di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu, sosial, religi, estetika dan budaya. Artinya, proses pendidikan berada di lingkungan manusia yang hidup dalam kelompok masyarakat (kehidupan sosial) atau dalam keterkaitan individu dengan lingkungannya (Prayitno & Manullang, 2011: 55-56). Pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses dan sistem pendidikan yang benar, diharapkan akan melahirkan manusia manusia yang baik akal, jiwa, dan ruhnya, dapat memegang amanah, serta bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seorang anak akan mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya atau yang mengasuhnya, di saat anak tersebut beranjak dewasa dan memasuki kehidupan berkeluarga, maka secara sunnatullah, merekalah kemudian yang mendidik anak-anaknya. Di sekolah, para siswa dididik oleh para gurunya, begitu juga di perguruan tinggi, para mahasiswa dididik oleh para dosennya.

Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan. Siapa pun dia, mulai dari bayi hingga dewasa dan tua selalu terlibat dalam proses pendidikan atau belajar untuk mengenal, mengetahui, memikirkan, memahami, mempertimbangkan atau memutuskan, dan berbuat untuk dilaksanakan. Demikian pentingnya urusan pendidikan, seolah tanpa proses pendidikan manusia tidak mampu berbuat atau bertindak dengan baik dan benar. Dengan demikian pendidikan menjadi persoalan utama dan pertama yang harus dialami oleh setiap manusia sebelum melakukan aktivitas apa pun (Azis, 2011: 69-70).

Melalui pendidikan, manusia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan kunci kemajuan ekonomi, sosial, budaya suatu masyarakat (Ahmad, 2011: vii).

Pendidikan sebagai suatu upaya menghadapi manusia (peserta didik) pada realitas yang terus saja berubah saat ini sangat diharapkan perannya untuk mampu mengikuti arus zaman, bukan berarti untuk mengikis kemanusiaan melainkan justru untuk menemukan kondisi kehidupan yang memungkinkan bangsa dapat tetap eksis dalam era globalisasi (Soyomukti, 2008: 41-42).

Dalam proses modernisasi tidak selalu dapat dicapai suatu perolehan yang adil bagi semua pihak, karena akan ada pihak yang lebih diuntungkan dan sebaliknya, ada pihak yang lebih dirugikan. Sebagai suatu unit yang terkait dalam proses transfer nilai-nilai budaya dan pengetahuan, maka bidang pendidikan di berbagai belahan dunia juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia, namun sebaliknya, kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia.

Sebagai suatu kekuatan dominan, globalisasi telah membentuk lingkungan budaya dan peradaban, baik secara positif maupun negatif. Dibalik berbagai pendapat yang masih pro dan kontra berkaitan dengan peran globalisasi, fenomena tersebut telah membawa berbagai dampak besar dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia (Handayani, 2008: 156).

Beberapa kecenderungan perkembangan masyarakat pada era global (Mahfud, 2009: 109-110) adalah di antaranya: 1). Masyarakat fungsional, yaitu masyarakat yang masing-masing warganya dalam berhubungan sosial hanya terjadi karena adanya kegunaan atau fungsi tertentu. 2). Masyarakat teknologis, yaitu masyarakat yang semua urusan dan kegiatannya harus dikerjakan menurut tekniknya masing-masing, yang cenderung sudah baku. 3). Masyarakat saintifik, yaitu masyarakat yang dalam menghargai manusia lebih diwarnai oleh seberapa jauh hal itu bernilai rasional objektif, *provable* (dapat dibuktikan secara empirik dan kaidah-kaidah ilmiah yang lain). 4). Masyarakat terbuka, yaitu suatu masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sebuah sistem. 5). Transendentalisasi agama, yaitu masyarakat yang meletakkan agama semata-mata sebagai masalah individu (personal/pribadi). 6). Masyarakat serba nilai, yaitu berkembangnya nilai budaya yang timbul akibat modernisasi itu sendiri.

Beberapa kecenderungan tersebut antara lain: sekulerisme, materialisme, individualisme, hedonisme, dan sebagainya.

Adalah suatu fakta yang tampak di depan mata, berbagai masalah menimpa anak Bangsa khususnya para generasi muda yang mengarah pada krisis moral dan akhlak. Penyakit krisis moral tengah menjalar dan menjangkiti bangsa ini. Hampir semua elemen bangsa juga merasakannya. Misalnya, Pilkada yang ricuh, kasus korupsi para politisi, hingga tebar janji-janji politik setiap kali menjelang pemilu. Sementara itu, merebaknya sikap hidup pragmatik, melembaganya budaya kekerasan, disadari atau tidak, telah ikut melemahkan karakter anak-anak bangsa sehingga nilai-nilai luhur baku dan kearifan sikap hidup menjadi mandul. Nilai-nilai etika telah terkikis oleh gaya hidup instan dan pragmatik (Noor, 2011: 42-43).

Pakar pendidikan Buchori (1995: 23) mengomentari bahwa mayoritas generasi muda saat ini tidak mendapatkan bekal yang memadai dari sekolah-sekolah menengah yang ada mengenai persoalan-persoalan bangsa yang sedang dihadapi bersama dan mengenai persoalan-persoalan yang segera akan dihadapi bersama. Tujuan pendidikan seharusnya mempersiapkan individu agar cakap hidup pada zamannya, mampu menghadapi dunia yang penuh tantangan dan cepat berubah. Proses pendidikan harus dapat membentuk manusia utuh berwawasan holistik, yang seluruh potensinya berkembang secara optimal (*whole person*). Pendidikan ditujukan untuk membangun seluruh dimensi manusia, yaitu untuk membangun dimensi sosial, emosional, motorik, akademik, spritual, kognitif, sehingga membentuk insan kamil (Megawangi, 2007: 22-23).

Dewasa ini, problem remaja, terutama pelajar dan mahasiswa sangat mudah meluapkan emosi dan gampang terprovokasi yang tidak terkendali sehingga berujung pada tawuran antarpelajar atau tawuran antarmahasiswa seperti yang seringkali diberitakan di media cetak (surat kabar) dan pada layar kaca televisi. Frekuensi tawuran atau perkelahian pelajar dari tahun ke tahun terus meningkat (Rifa'i, 2011: 190). Sebetulnya, persoalan yang sering menjadi pemicu tawuran-tawuran itu sangat sederhana. Biasanya, tawuran itu dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat, ingin menang sendiri, maupun hal-hal sepele lainnya

(Yamin, 2009: 184). Para remaja yang rata-rata masih belia tersebut, ingin menunjukkan kehebatannya dalam hal-hal tertentu.

Berbagai kasus kenakalan remaja di Makassar sudah pada tahap yang meresahkan masyarakat. Sebagian besar kenakalan remaja ditandai dengan seringnya terjadi tawuran antarpelajar di Kota Makassar.

“Aksi tawuran antarpelajar pecah di Makassar, Selasa siang, 20 September 2011. Tawuran pelajar ini melibatkan pelajar dari tiga sekolah, masing-masing SMKN 3 Makassar, SMAN 8 Makassar, dan SMAN 11 Makassar. Puluhan pelajar dari tiga sekolah tersebut tawuran di Jalan Baji Gau, Makassar. Tawuran berlangsung saat puluhan puluhan siswa SMKN 3 Makassar yang mengendarai sepeda motor, menyerang siswa SMAN 8 Makassar di Jalan Baji Gau. Mereka menyerang menggunakan batu dan balok. Tidak terima diserang, puluhan siswa SMAN 8 serta didukung warga sekitar membalas dengan melempari penyerang. Aksi saling lempar batu pun tidak terhindarkan. Selama beberapa saat saling serang, siswa SMKN 3 akhirnya mundur. Para siswa SMKN 3 ini melarikan diri ke depan SMAN 11 di Jalan Mappaouddang. Letak SMAN 11 dan SMAN 8 memang tidak berjauhan. Siswa SMAN 8 dibantu warga pun melakukan penyerangan ke sekolah tersebut. Aksi saling lempar kembali terjadi dan melibatkan pelajar dari tiga sekolah. Saat siswa SMAN 8 menyerang ke SMAN 11 setelah jam pelajaran usai. Lantaran diserang tiba-tiba, sejumlah siswa SMAN 8 dilaporkan terluka terkena lemparan batu.” (*FAJAR on line*, September 2011).

Tawuran antarpelajar kerap terjadi dan seakan menjadi problem pendidikan Indonesia yang sulit untuk dicari solusinya. Fakta membuktikan, bahwa tawuran antarpelajar dan mahasiswa yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di Jakarta atau Makassar saja. Bahkan beberapa kota besar lainnya, seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota yang lain juga sering terjadi. Kasus ini seakan menjadi rutinitas yang bermuatan dendam yang tiada ujungnya. Sungguh sebuah problema yang harus segera dicarikan solusinya. *Kompas.com* (11 November 2012) menyebutkan:

Data dari tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan dua anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta dua anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Pada 2010, setidaknya terjadi 128 kasus tawuran antarpelajar. Pada 2011, terdapat 330 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Kemudian pada Januari-Juni 2012, telah terjadi 139 tawuran yang

menewaskan 12 pelajar. Kasus ini diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada solusi jitu yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Sedangkan untuk kalangan perguruan tinggi, tawuran mahasiswa juga terjadi dimana mana. Khususnya di Makassar, tawuran pelajar seakan menjadi rutinitas. Bahkan Makassar terkenal dengan istilah “kota tawuran”.

Di Makassar, hampir setiap tahunnya terjadi tawuran antarpelajar, maupun antarmahasiswa baik yang terjadi antara perguruan tinggi lain, maupun satu perguruan tinggi tetapi beda fakultas dan beda jurusan. Sungguh suatu kondisi realitas yang mencerminkan begitu buram dan rapuhnya pendidikan di kota ini.

Selain tawuran antarpelajar juga terdapat aksi kekerasan geng motor. Timbulnya fenomena aksi kekerasan pada kelompok geng motor, merupakan penyimpangan remaja yang disebabkan gagalnya pendidikan, khususnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Kondisi tersebut diperparah, ketika para remaja merasa lebih nyaman berada dalam kelompoknya.

Dalam catatan kriminal yang terjadi sejak April 2012 hingga Mei 2013 di Makassar, diduga dilakukan oleh kelompok geng motor, sebagaimana yang dilaporkan oleh *Sindonews.com* (9 Mei 2013) bahwa tercatat hampir sekitar 19 kasus kriminalitas yang dilakukan oleh kumpulan anak muda/remaja di Makassar:

“Sabtu 14 April 2012, Mahasiswa UNM Ibrahim, 22, tewas dikeroyok geng motor. Minggu 27 Januari 2013, Warga Jl. Landak terlibat tawuran dengan kelompok geng motor. Senin 28 Januari 2013, Sebuah mobil di depan Kampus UVRI dirusak geng motor. Minggu 20 Januari 2013, Sebuah ATM Bank Mandiri dirusak geng motor. Senin 18 Februari 2013, Kelompok geng motor serang pemukiman warga di Jl. Veteran. Kamis 14 Februari 2013, Anggota Brimob Polda Sulselbar Briptu Yusriandi dibacok gerombolan geng motor. Minggu 17 Februari 2013, Sebuah klub motor diserang sekelompok geng motor. Minggu 10 Februari 2013, Teror molotov di Gereja Toraja Mamasa (GTM), diduga dilakukan geng motor. Minggu 10 Februari 2013, Teror molotov di Gereja Toraja Jemaat Tiatira Malengkeri, diduga dilakukan geng motor. Kamis 14 Februari 2013, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulsel di Jl. Samiun, diduga dilakukan geng motor. Kamis 14 Februari 2013, Gereja Toraja di Jl. Gatot Subroto, diduga dilakukan geng motor. Kamis 14 Februari 2013, Gereja Toraja Klasik di Jl. Pettarani II, diduga dilakukan geng motor. Minggu 17 Maret 2013, Minimarket Circle K di Jl. Pengayoman, dirusak kawanan geng motor. Minggu Maret 2013, Ilham warga Jl. Kandeas tewas mengenaskan setelah dikeroyok geng motor. Rabu 13 Maret 2013, Satu unit bus PO Bintang Prima dibakar di Jl. Perintis Kemerdekaan, diduga melibatkan geng

motor. Jumat 5 April 2013, Wartawan Fajar TV Harun Rasyid dipanah kelompok geng motor. Minggu 7 April 2013, Sebuah sepeda motor milik warga dibakar kelompok geng motor. Selasa 16 April 2013, Dua karyawan dicegat di Jl. Maccini Raya, oleh belasan geng motor. Kamis 9 Mei 2013, Wartawan Trans TV Endi dicegat dan ditikam kelompok geng motor di Jl. Urip Sumardjo, Makassar.“

Di kota-kota besar, mahasiswa dan pelajar terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dengan berbagai jenisnya. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya atau narkoba di Makassar setiap tahun meningkat. Menurut *Tribun Timur.com* (Kamis, 29 Maret 2012):

Data dari BNK Makassar yang disadur dari satuan reserse narkoba, sebanyak 155 kasus narkoba pada tahun 2009. Meningkat sebanyak 169 kasus pada tahun 2010. Meningkat lagi sebanyak 234 kasus pada tahun 2011. Hingga Februari 2012, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 32 kasus.

Selain masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para remaja di kota Makassar, juga terdapat masalah lainnya, yakni masalah miras. *Metrotvnews.com*, (Ahad, 19 Mei 2013), memberitakan:

“Belasan remaja belasan tahun diamankan patroli Kepolisian sektor kota Mamajang, Makassar, malam, usai berpesta minuman keras (miras). Mereka langsung digiring ke Mapolsekta Mamajang untuk menjalani pemeriksaan. Sebanyak 17 remaja berusia belasan tahun itu tidak berkutik saat tertangkap tangan sedang berpesta minuman keras di Tanjung Alang, kecamatan Mamajang, Makassar, Sulsel.“

Perilaku mengkonsumsi miras di kalangan pelajar menambah panjang stigma negatif pemuda/remaja di kota-kota besar termasuk di Makassar.

Stigma pelajar saat ini diperparah oleh perilaku penyimpangan sosial yang mereka lakukan dalam bentuk pergaulan bebas (*free sex*, aborsi, homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya). Mereka juga terkesan kurang hormat kepada orang tuanya sendiri, guru (dosen), orang yang lebih tua, dan tokoh masyarakat. Kenakalan remaja adalah suatu hal yang serius untuk dicarikan solusi (Fitri, 2012: 10). Menurut Rifa'i (2011: 216):

“Masalah kenakalan anak sering menimbulkan kecemasan sosial karena eksesnya dapat menimbulkan *gap generation* sebab anak-anak yang diharapkan sebagai kader-kader penerus serta calon-calon pemimpin

bangsa banyak tergelincir dalam lumpur kehinaan, bagaikan kuncup bunga yang berguguran sebelum mekar menyebarkan wangi.”

Fenomena bangsa ini dapat diilustrasikan sebagai sosok anak bangsa yang berada dalam kondisi *split personality* (kepribadian yang pecah, tidak utuh) (Fitri, 2012: 10). Adanya gejala yang tampak di kalangan anak muda, bahkan orang tua yang sudah mengabaikan nilai-nilai sosial budaya dalam tatakrama pergaulan merupakan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan (Fardus, 2009: 5-6).

Kondisi krisis dan dekadensi moral yang telah disebutkan di atas menandakan bahwa pengetahuan agama dan moral yang didapatkan seorang siswa di bangku sekolah ternyata tidak berdampak terhadap perubahan perilaku. Bahkan yang terlihat adalah begitu banyaknya manusia Indonesia yang tidak konsisten, lain yang dibicarakan, lain pula tindakannya. Ada yang berpandangan bahwa kondisi demikian diduga berawal dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan (Zubaedi, 2011: 2).

Di tengah-tengah pusaran globalisasi, pendidikan harus dikelola secara strategis. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan anak-anak bangsa menjadi manusia yang berkualitas dengan kepribadian yang benar-benar cocok dengan dinamika di era modern. Menurut Alwasilah (2008: 116), selama ini pendidikan nasional kita sangat sentralistik. Orientasinya sangat nasional, dan ini dibayar mahal dengan terabaikannya potensi-potensi lokal.

Banyak yang kurang menyadari bahwa saat ini kondisi anak Bangsa lambat laun telah tercerabut dari akar budaya sendiri sehingga kehilangan identitasnya. Mengutip Pernyataan Moisi (Alwasilah, *Pikiran Rakyat*, 3 Mei 2012b):

“Asians do not perceive themselves as Asians in the way that most Europeans view themselves as Europeans.” Ada cara pandang yang berbeda dalam mempersepsi diri antara bangsa Asia dan Eropa. Cara pandang mereka digunakan dalam memandang bangsa Asia. Bangsa Asia sendiri lebih bangga mempelajari budaya Eropa daripada mempelajari budaya Asia sendiri, sehingga mereka tercerabut dari akar budayanya.

Identitas suatu bangsa merupakan tumpuan yang kuat, bukan hanya bagi perkembangan pribadinya, tetapi juga sebagai benteng pertahanan yang

melindungi pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan global. Dalam keadaan tanpa identitas dengan mudah kita dihanyutkan oleh arus globalisasi tanpa tujuan dan bukan tidak mungkin, terjatuh dalam berbagai bentuk kehidupan tanpa bentuk, tanpa identitas, bahkan mungkin tidak malu menjadi bangsa Indonesia yang tidak memiliki identitas (Tilaar, 2004: 17).

Melepaskan jeratan hegemoni asing dalam dunia pendidikan Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang harus digelar karena jika tidak, budaya bangsa Indonesia akan tercerabut dan menjadi hilang dari kehidupan anak-anak bangsa sehingga ini pun akan mempengaruhi bangsa sendiri secara luas yang juga akan mengakibatkan kehilangan identitas budaya sendiri (Yamin, 2009: 179). Buah pendidikan diharapkan lahirnya anak bangsa yang tak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Adalah suatu fakta, kondisi real yang ada di lapangan masih ditemukannya beberapa lembaga pendidikan yang hanya berpacu untuk meningkatkan nilai kecerdasan otak, namun mengabaikan kecerdasan hati, jiwa, dan perilaku, pendidikan tampaknya mengalami kepincangan dalam mencapai tujuannya yang hakiki. Akibatnya, seringkali dijumpai perilaku tidak terdidik yang justru dilakukan oleh kaum yang mengenyam bangku pendidikan. Bahkan, contoh-contoh seperti ini ditunjukkan secara terbuka oleh elite-elite pemerintahan, seperti banyaknya pejabat yang korup, padahal mereka memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi (Aunillah, 2011: 13).

Selama ini, menurut Tilaar (2004: 191-192), di dalam proses pendidikan nasional cenderung memisahkan praksis pendidikan dari nilai-nilai kebudayaan. Proses pemiskinan kebudayaan terjadi karena pendekatan reduksionisme telah terjadi di dalam proses pendidikan nasional dewasa ini. Belum lagi apabila berbicara mengenai kebhinnekaan budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang sarat akan nilai-nilai moral, etis, estetika, dan nilai-nilai lainnya. Kebudayaan lokal (tradisional) mulai dilupakan dan kebudayaan nasional tersingkirkan, maka yang tersisa hanyalah nilai-nilai budaya yang dapat dikomersialkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara permasalahan bangsa saat ini, adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun di tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai ini sangat tampak dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, kejujuran, rasa malu, dan cinta tanah air dirasakan semakin memudar.” (*Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, Mulyasa, 2012: 249).

Pengertian budaya yang dulu dipahami sebagai hasil budi daya atau keinginan manusia untuk berubah ke arah yang lebih baik, saat ini mengalami penyempitan makna. Budaya bukan lagi hasil kontemplasi sebagai sekadar kebiasaan saja, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara luas oleh orang banyak, dari berbagai lapisan masyarakat. Anehnya, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap budaya itu adalah kecenderungan dan perilaku buruk, sehingga beberapa perilaku yang tidak terpuji dianggap sebagai budaya, misalnya kebiasaan datang terlambat (jam karet), mencari kambing hitam, merasa paling benar atau menang sendiri, main hakim sendiri (Azis, 2011: 60).

Fungsi lembaga-lembaga pendidikan adalah untuk mentransformasikan nilai-nilai budaya. Proses transformasi nilai-nilai budaya mempunyai dua prinsip. Prinsip pertama, ialah pengakuan adanya kenyataan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah keragamannya. Kedua, nilai-nilai budaya bhinneka yang dipilah-pilah untuk memilah nilai-nilai luhur yang perlu dipertahankan serta meninggalkan nilai-nilai yang tidak berfungsi lagi dalam menghadapi perubahan (Tilaar, 2004: 210-211). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Enwistle (1979: 110) “*a culture must include strands which are technologically or economically dysfunctional, others which aggravate social injustice, and yet others which offend moral and aesthetic values, anthropologically,*”

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang unik dan sesuai dengan keunikan dan spesifikasi masyarakatnya itu sendiri dan sentuhan lingkungan alam yang mengitarinya. Keunikan dan spesifikasi kebudayaan itu sendiri tercermin dalam tiga wujud kompleks yaitu idea-idea tingkah laku berpola serta kompleks

benda-benda fisik material yang secara konseptual dapat ditelusuri kebudayaannya di dalam tujuh unsur kebudayaan yang berlaku secara universal. Menurut Koentjaraningrat (2000: 2) unsur-unsur universal itu, yang sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, adalah: 1). Sistem religi dan upacara keagamaan; 2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan; 3). Sistem pengetahuan; 4). Bahasa; 5). Kesenian; 6). Sistem mata pencaharian hidup; 7). Sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur kebudayaan universal di atas memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk manusia di mana pun juga di dunia, dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dan konsepnya.

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki keragaman masyarakat yang tinggi sekaligus dapat dikatakan sebagai negara multikultural. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural yang beragam maupun geografis yang begitu luas. Selain itu, bangsa Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Etnisitas bangsa Indonesia merupakan inti dari setiap pribadi Indonesia. Sejak dilahirkan dia mengenal adat istiadat, bahasa, kerukunan hidup di dalam masyarakat etnisnya. Kemudian identitas etnis ini dikembangkan menjadi identitas bangsa Indonesia (Tilaar, 2008: 24).

Keadaan itu menjadi potensi yang begitu besar dimiliki Indonesia dengan segala keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, agama, maupun tokoh, dan anggota masyarakatnya sehingga dapat menjadi nilai sebagai kekayaan yang terpendam di dalamnya. Jumlah suku-suku bangsa yang sangat besar tersebut tentunya memiliki kekayaan berupa kearifan lokal masing-masing. Kearifan yang dulu pernah menjadi media pembentukan karakter manusia yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang bersumberkan dari nilai-nilai budaya tradisional yang dimilikinya.

Menurut pakar budaya UGM, Ahimsa (2007: 52) nilai-nilai budaya tradisional adalah nilai-nilai budaya yang berasal dari generasi-generasi pendahulu sebuah komunitas atau masyarakat. Nilai-nilai budaya ini dapat bertahan dalam suatu masyarakat karena selalu diwariskan, disosialisasikan oleh setiap generasi masyarakat tersebut kepada generasi berikutnya lewat interaksi

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Meninggalkan nilai-nilai budaya yang selama ini dianut oleh generasi-generasi sebelumnya akan menimbulkan suatu rasa keterputusan dengan generasi-generasi tersebut, dan biasanya juga menimbulkan perasaan-perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, atau perasaan kehilangan identitas.

Masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam kenyataannya merupakan masyarakat yang *bhineka* (atau dengan kata lain masyarakat multikultural). Nilai-nilai budaya yang konkret adalah nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan lokal (tradisional). Oleh sebab itu, pengakuan terhadap kebudayaan lokal berarti pengakuan terhadap nilai-nilai yang mendasari tingkah laku dan tindakan manusia Indonesia (Tilaar, 2004: 214).

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu budaya tertentu. Banyak nilai budaya dan orientasinya yang bisa menghambat dan sebaliknya, bisa mendorong pendidikan. Juga banyak pula nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan secara sadar dalam proses pendidikan (Zamroni, 2000: 88). Pendidikan yang tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal (tradisional), akan diharapkan mampu membawa anak bangsa ini untuk senantiasa tetap berdiri di atas kaki sendiri.

Sekolah mesti memahami kultur dan kebudayaan setempat sehingga dapat menanamkan berbagai macam nilai kearifan lokal yang dihidupi dan dianggap sebagai warisan kebudayaan sebuah masyarakat (Koesoma, 2012: 101). Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren lewat pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya “yang lain”. Nilai-nilai *local wisdom* meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas bangsa. Kearifan-kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional (Sariyatun, 2010: 115).

Sebagai bahan bandingan, Jepang adalah negara yang pernah hancur lebur di tahun 1945 akibat bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, namun mampu bangkit kembali, bahkan saat ini menjadi bangsa yang besar di

tengah percaturan dan industri dunia. Hal itu disebabkan mereka tidak meninggalkan nilai budaya lokal “*bushido*” yang bermakna ‘kerja keras’, ‘disiplin tinggi’, dan ‘pantang menyerah’ yang senantiasa tetap diajarkan di sekolah dalam rangka pendidikan kemandirian dan kewiraswastaan untuk membangun bangsanya (Yamin, 2009: 271). Selain semangat kerja keras, budaya Jepang dalam ‘moral Ninomiya Kinjiro’ juga menekankan rasa keindahan yang tercermin pada ketekunan, hemat, jujur, dan bersih (Zamroni, 2000: 88).

Di Indonesia, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya. Kewenangan itu berimplikasi pada pengelola pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Pergeseran kewenangan itu berdampak pada pengelolaan pendidikan yang kemudian menyebabkan otonomi pada satuan pendidikan (sekolah) (Badrin, 2009: 45). Hal ini memberikan peluang pada sekolah untuk memikirkan sendiri pengembangannya, termasuk pengembangan kurikulum muatan lokal.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang tanggungjawab utamanya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan IPS untuk membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai SDM yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional (Ahmadi & Amri, 2011: 9).

Dalam era global saat ini, anak akan dihadapkan pada banyak pilihan tentang nilai yang mungkin dianggapnya baik. Pertukaran dan pengikisan nilai-nilai suatu masyarakat dewasa ini akan mungkin terjadi secara terbuka. Nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu kelompok masyarakat bukan tak mungkin akan menjadi luntur digantikan oleh nilai-nilai baru yang belum tentu cocok dengan budaya masyarakatnya (Sanjaya, 2007: 273-274).

Pada saat ini, banyak sekali tingkah laku dan perbuatan atau adat istiadat yang dahulu dianggap baik, sekarang pun tetap masih baik dan masih perlu dipertahankan. Sebaliknya, banyak hal yang baru sebenarnya tidak baik dan tidak sesuai dengan adat istiadat atau pandangan hidup bangsa kita, yang tidak perlu dikembangkan dan bahkan harus dibuang (Purwanto, 2007: 28-29). Hal ini sejalan dengan pendapat Hermawan:

“Anggapan untuk menjadi modern harus meninggalkan nilai budaya sendiri dan beralih kepada nilai budaya yang datang dari luar merupakan anggapan keliru dan tidak mendasar, karena untuk menjadi manusia modern yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak harus menjadi Barat serta meninggalkan nilai budaya milik sendiri. Sehingga, mewariskan tata nilai budaya sendiri kepada generasi muda di tengah arus modernisasi dan globalisasi sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat agar mereka tidak kehilangan jati diri dan identitas sebagai sebuah bangsa” (Hermawan, 2008: viii).

Dengan adanya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berubah pula pendapat dan penilaian orang terhadap segala sesuatunya. Terjadi kemungkinan, bahwa nilai kehidupan yang dulu dianggap sebagai nilai yang memang mutlak harus ada, kini meluntur atau dianggap sebagai nilai yang sudah sepatutnya dibuang jauh-jauh (Martoyo, 1983: 13).

Sesungguhnya IPS (*social studies*) ditujukan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif di masyarakat (Maftuh, 2010: 27). Menurut Al-Muchtar (2004: 18) pendidikan IPS hendaknya sarat dengan muatan nilai, dan tidak dikenal adanya “bebas nilai”. Mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan IPS seharusnya menopang pada tujuan tersebut. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa mengisyaratkan bahwa pendidikan IPS harus “bermuatan nilai.”

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang mengembangkan kompetensi dan keterampilan berwarganegara sebagai tujuan utamanya. IPS merupakan mata pelajaran yang terutama memiliki perhatian utama membantu siswa menjadi warga negara yang baik. Banks (1990), juga

Hennings & Hennings (Maftuh, 2009: 69), setuju bahwa IPS mesti membantu siswa mengembangkan pengetahuan, pengertian, keterampilan, dan nilai yang esensial bagi warga negara dalam suatu bangsa.

Merujuk pada tujuan utamanya, IPS memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan nilai. Nilai dapat diajarkan melalui IPS. Dalam IPS nilai juga sama pentingnya dengan pengetahuan dan keterampilan. Maftuh (2009: 70) mengutip pendapat Ganguli, Mehrota, dan Mehlinger (1981) menyatakan bahwa: *“values are inextricable part of the social studies... values are embedded in the subject-matter of social studies....”* Walaupun IPS tidak mempunyai otoritas khusus (eksklusif) terhadap penanaman nilai, tetapi IPS mempunyai peluang yang unik untuk mengajarkan nilai yang tidak boleh diabaikan oleh seorang guru.

Perubahan nilai-nilai yang ditimbulkan sebagai dampak dari globalisasi harus disikapi secara arif dan bijaksana. Dalam mencermati perubahan-perubahan yang ada maka kurikulum IPS harus memiliki landasan filosofis humanistik. IPS harus menjunjung tinggi sifat-sifat dasar kemanusiaan. Prinsip-prinsip dasar kemanusiaan tersebut meliputi keadilan, kesetaraan, kearifan, dan keragaman.

Kurikulum IPS harus mampu membangun jati diri bangsa yang berbasis pada kearifan lokal untuk menuju masa depan yang lebih manusiawi. Masyarakat yang akan dibentuk dari pendidikan IPS ini adalah masyarakat yang mendunia, yang tetap berpijak pada kearifan lokal. Kearifan lokal dapat tumbuh karena adanya kesadaran keruangan dan kesadaran waktu. Kesadaran ruang yang dimaksud adalah menyadari dimana dia tinggal, sedangkan kesadaran waktu yaitu memahami bahwa dia hidup dalam suatu masyarakat yang berubah. Jadi, globalisasi tidak menceraabut akar-akar budaya yang dimilikinya (Puskur, 2007: 1).

Keragaman bangsa Indonesia dari sisi etnis, suku budaya dan lain-lainnya, sejatinya juga merujuk kepada karakteristik masing-masing. Pada saat yang sama, kekhasan itu pada umumnya memiliki kearifan yang pada masa-masa lalu menjadi salah satu sumber nilai dan inspirasi dalam merajut dan menapaki kehidupan mereka. Pembangunan yang cenderung hanya mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya mengakibatkan keajegan kearifan lokal sebagai produk budaya

yang telah sekian lama terbukti efektif menjadi terabaikan (*Opini Kompas*, 17 Juni 2011).

Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut, misalnya *alon-alon asal klakon* = biar lambat, yang penting tujuan tercapai (masyarakat Jawa Tengah), *rawe-rawe rantas malang-malang putung* = kalau mengerjakan sesuatu, jangan setengah-setengah, harus tuntas (masyarakat Jawa Timur), *ikhlas kiaine manfaat ilmune, patuh gurune barokah uripe* = kiyai yang ikhlash akan bermanfaat ilmunya, patuh kepada guru, akan berkah hidupnya (masyarakat pesantren), dan sebagainya (Setiyadi, 2012: 191).

Kearifan lokal atau potensi lokal turut terlibat dalam membangun potensi dan membangun kesadaran setiap individu. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Safa, dkk., 2011: 160). Kini, pengetahuan mengenai kearifan lokal semakin memudar di kalangan generasi muda, karena pergeseran budaya dan sosial ke arah konsumerisme dan teknologi (sains) yang salah kaprah (Isnendes, dkk., 2012: 332).

Sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau ‘*enculturation*’, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktik pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat (Zamroni, 2000: 81-82). Berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas, sudah saatnya kini untuk kembali merekonstruksi praktik pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal yang dalam ilmu pedagogi lebih dikenal dengan istilah *etnopedagogi*. Kajian Etnopedagogi dapat dimasukkan sebagai muatan lokal dalam salah satu materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah termasuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

“Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggulangan, dan sebagainya. Wacana tersebut akan berkembang dalam etnofilosofis, etnopsikologi, etnomusikologi, etnopolitik, dan sejenisnya” (Alwasilah, dkk., 2009: 50).

Kajian etnopedagogi memandang pengetahuan tradisional atau kearifan lokal (*local knowledge, local wisdom*) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan dalam sistem pendidikan. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Ini mencakup cara mengamati dan mengukur alam sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan (Alwasilah, 2009: 51).

Di tengah-tengah warisan kebudayaan Indonesia masa lalu, naskah sering kali diabaikan. Naskah dianggap kurang lebih sama dengan teks, khususnya teks tradisional, dan oleh karena itu menjadi mata-perhatian orang tertentu saja, khususnya para pustakawan dan filolog. Akan tetapi naskah itu mempunyai dimensi dan makna yang jauh lebih luas, karena merupakan hasil tradisi yang melibatkan berbagai keterampilan dan sikap budaya (Chambert-Loir, 1997: 7).

Di Indonesia, butir-butir mutiara kebudayaan pada masa lampau yang sampai kepada kita sebagai warisan kebudayaan para leluhur antara lain terdapat di dalam berbagai cerita rakyat, ungkapan-ungkapan, peribahasa, dan untaian nasihat atau petuah para leluhur yang masih diturunkan dari mulut ke mulut yang kini telah banyak direkam di dalam berbagai tulisan dalam bentuk naskah yang merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal (Abubakar, 2011: 17).

Dalam berbagai ungkapan tradisional yang merupakan mutiara kata dari nenek moyang mengandung pesan moral yang dapat berlaku sepanjang jaman. Ungkapan-ungkapan tradisional tersebut dibuat sebagai petuah, nasihat yang disampaikan secara tersirat dengan memperhatikan estetika bahasa yang tinggi (Widyastuti, 2012: 133). Ungkapan-ungkapan tersebut termuat dalam berbagai teks/naskah yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Teks-teks tulis (dalam bentuk naskah) yang bersifat susastra sangat banyak memiliki nilai-nilai pendidikan yang berakar se-Nusantara. Teks-teks (dalam bentuk naskah) itu umumnya pada bagian-bagian tertentu dapat dijadikan bahan ajar sesuai keperluan dan tema yang diajarkan (Suarta, 2: 2012).

Pentingnya pengkajian isi naskah telah disepakati oleh para ahli. Di antara pendapat para ahli tersebut, seperti yang dikemukakan dalam pendahuluan buku Chambert-Loir dan Fathurahman (Tjandrasasmita, 2009: 201-202), mereka mengatakan:

“Bidang-bidang yang terkandung dalam naskah sangatlah luas. Siapa pun yang akrab dengan naskah Indonesia, mengetahui bahwa naskah-naskah itu mengandung kekayaan informasi yang berlimpah. Naskah memuat informasi lebih banyak daripada sastra yang bersifat terbatas. Naskah mengandung hal-hal yang terdapat dalam disiplin ilmu lain, seperti agama, sejarah, hukum, adat istiadat, obat-obatan, teknologi, dan informasi lain. Para ahli dari wilayah yang beragam ini seharusnya dapat memanfaatkan kekayaan informasi ini. Ahli hukum dan ahli sejarah telah lama menyadari hal ini. Meskipun begitu mereka cenderung menggunakan edisi teks yang disunting ahli-ahli filologi, walaupun banyak sekali naskah yang belum diterbitkan dan belum terpakai.”

Naskah sebagai peninggalan masa lampau, mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa naskah-naskah itu mengandung nilai yang berharga dan banyak bermutu tinggi (Rusyana, 2007: 4).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soeratno (1996: 4), bahwa informasi yang didapatkan dari katalog tempat-tempat penyimpanan naskah lama dapat diketahui bahwa terdapat beranekamacam kandungan yang tersimpan dalam naskah-naskah Indonesia tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini kandungan, antara lain berupa ajaran agama, sejarah, hukum, adat istiadat, filsafat, politik, sastra, astronomi, ajaran moral, mantera, do'a, obat-obatan, mistik, bahasa, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dsb. Hal ini sejalan dengan pendapat Rosa (2011: 270):

“Dengan mengkaji naskah, maka akan terlihat betapa besarnya peranan lokal genius pada masanya dalam menginformasikan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, semua naskah dapat dijadikan sebagai objek kajian utama, terutama naskah-naskah yang sudah di edisi teks-kan (dan telah ditransliterasikan) oleh para filolog”.

Di Sulawesi Selatan, nilai-nilai kearifan lokal tersimpan dalam berbagai media, antara lain: lisan dan tulisan. Media tulisan dituangkan melalui naskah lontaraq. Dalam lontaraq ini, orang Bugis Makassar menyimpan ilmu dan kearifan

masa lalunya, termasuk berbagai ekspresi kebudayaannya. Naskah lontaraq memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar sejak zaman dahulu karena mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi dan menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dikatakan lontaraq, menurut Manyambeang (1997: 73) karena ‘lontaraq’ selalu dihubungkan dengan asal tempat penulisan aksara ini yakni sebelum kertas digunakan, ditulis di atas daun lontar. Lontaraq memiliki makna ganda, yakni di satu sisi bermakna tulisan-tulisan yang terdapat di daun lontar, namun pada sisi yang lain bermakna sejarah. Menurut PaEni (2009: 237), dahulu pada kerajaan-kerajaan Bugis Makassar, hampir semua raja-raja Bugis Makassar memiliki lontaraq, dalam arti sebagai naskah yang berisi tentang sejarah leluhur mereka. Tanpa lontaraq seorang raja belumlah absah sebagai raja. Itulah sebabnya lontaraq dalam arti sejarah ini dipelihara di dalam istana raja-raja yang sewaktu-waktu dibuka apabila diperlukan untuk menjelaskan keaslian keturunan mereka.

Keunggulan lontaraq sebagai sumber rujukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, telah menarik perhatian para ilmuwan barat. Seperti yang dikemukakan oleh pakar Budaya Sulawesi Selatan, Abidin (1999: 2) yang menyebutkan beberapa ilmuwan barat yang menjadi lontaraq sebagai referensi dalam studi yang mereka kaji:

“... lihatlah karangan A.A. Cense, “*Enige aantekeningen over Makassar – Boeginese geschiedschrijving*”. Juga karangan R.A. Kern, “*Proeve van Boeginiesche geschiedschrijving*”, BKI, deel CIV (1948). Periksa pula karangan J. Noorduyn berjudul “*Een achttiende eeuwse kroniek van Wajo*” Dissertatie di Leiden, 1995, “*South Celebes Historical Writing*” dalam kumpulan karangan “*An Introduction to Indonesian Historiography*”, ed. By Soedjatmoko *et. al*, Cornel University Press, Ithaca New York, 1965, “*Een Boegines geschriftje over Arung Singkang*”, BKI deel CIX (1953) dan “*De Islamisering van Makassar*”, BKI deel CXII (1956)”.

Sebenarnya masih banyak lagi orang Barat yang menggunakan lontaraq sebagai bahan kajiannya, ini terlihat dalam tulisan Andaya (1981) *The Heritage of Arung Palakka: a History of South Sulawesi (Celebes) in The Seventeenth Century*; Caldwell (1988) *South Sulawesi A.D. 1300-1600: Ten Bugis Text*. Ph.D thesis The Australian National University; Eerdmans (tt) *Algemeene Geschiedenis van*

Celebes; Friedericy (1929) *De Gowa-Federatie*', in: *Adatrechtbundels* 31; 364-427; Gervaise (1701) *An Historical Description of the Kingdom of Macassar in the East Indies*; Krucq (1941) *De Geschiedenis van Het Heilig Kanon van Makassar*, TBG 81: 74-95; Ligtvoet (1880) *Transcriptie van Het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tello, met Vertaling en Aantekeningen*, BKI 28: 1-259; Macknight (1984) *The Concept of a 'work' in Bugis Manuscript*; Macknight (1972) *The Early History of South Sulawesi: Some Recent Advances* dan masih banyak lagi karangan penulis asing lainnya.

Filolog Bugis Makassar, Nurhayati Rahman (2012), menyebutkan bahwa naskah lontaraq memiliki kandungan yang sangat kaya dengan nilai-nilai dan merupakan sumber ilmu pengetahuan. Naskah-naskah ini sangat penting artinya bagi studi sosial kemasyarakatan, karena melalui naskah-naskah ini dapat diperoleh berbagai informasi ilmu pengetahuan tentang fluktuasi kehidupan yang dialami oleh masyarakat Bugis Makassar yang telah terbukti dan dipakai oleh masyarakat pendukungnya selama ratusan tahun, terutama bagaimana menerapkan nilai kejujuran, keberanian, satunya kata dengan perbuatan, dan teguh pada pendirian (komunikasi pribadi, Maret, 2012).

Lontaraq terdiri dari berbagai jenis. Budayawan Sulawesi Selatan, Mattulada (1995: 16-19) membagi jenis-jenis lontaraq sebagai berikut, di antaranya: 1) *pappasêng* (Bugis)/*pappasang* (Makassar); 2) *atturiolong*; 3) *pau-pau ri kadong*; 4) *toloq* atau *pau-pau*, biasa juga disebut *ruajaq*; 5) *pappangajaq*; 6) lontaraq *ulu ada*; 7) *sureq bicara atturiolong*; 8) *sureq eja*, ialah kumpulan *elong*; 9) *sureq bawang*; 10) *pau kotika/lontaraq kutika*.

Begitu luas dan dalam jika mengkaji tentang lontaraq ini, namun dalam kajian disertasi ini, penulis hanya membatasi dengan mengkaji kandungan lontaraq *pappasêng/pappasang* sebagai bahan untuk kajian dalam nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan dalam muatan lokal pendidikan IPS. Hal ini didasari bahwa dahulu lontaraq *pappasêng/pappasang* adalah merupakan rujukan para raja, dan juga rujukan dewan adat yang tentunya juga menjadi rujukan bagi masyarakat yang hidup di masa itu (Nurhayati, komunikasi pribadi, Maret, 2012).

Jika dicermati secara mendalam lontaraq *pappasêng/pappasang* ternyata memuat banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal dimaksud sangat penting dikaji dan diangkat ke permukaan, sebab nilai-nilai kearifan lokal yang dimuat di dalamnya masih sangat relevan untuk menghadapi kehidupan masa kini dalam era globalisasi. Isi *pappasêng/pappasang* yang berbentuk manuskrip berbahasa Bugis Makassar antara lain adalah pemberian tuntunan kepada masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, rasa, dan karsa, baik sebagai pemimpin maupun anggota masyarakat (Iswary, 2012: 98-99).

Pesan-pesan yang terdapat di dalamnya perlu diresosialisasikan kepada masyarakat Bugis Makassar sebagai pemilik budaya, agar masing-masing individu dapat menghayati dan menginternalisasikan dalam kehidupannya. Selanjutnya para orang tua dapat mewariskan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan jalan mendidik karakter anak-anak mereka sejak dini (Iswary, 2012: 103). Jenis-jenis pesan yang bersumber dari kearifan lokal Bugis Makassar tersebut sangatlah kaya akan nuansa pendidikan, khususnya pendidikan manusia yang berkarakter.

Suatu hal yang amat disayangkan dalam pembelajaran di kelas, khususnya di SMP nilai-nilai yang terdapat dalam *pappasêng/pappasang* tidak diajarkan. Menurut hasil observasi awal penulis di beberapa sekolah, kajian etnopedagogi ini tidak diajarkan disebabkan beberapa hal, di antaranya: 1) Guru tidak menyiapkan alokasi waktu khusus untuk muatan lokal. 2) guru tidak mengetahui adanya ruang bagi muatan lokal yang dapat diajarkan. 3) guru IPS yang mengajar, bukan guru bidang studi IPS melainkan dari bidang studi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. 4) guru yang mengajar sama sekali bukan berlatar belakang IPS, sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. 5) guru IPS yang mengajar tidak menguasai bahasa dan budaya daerah setempat karena berasal dari daerah lain (bukan orang Bugis Makassar) (Interview, guru-guru IPS di Kab. Gowa dan kota Makassar).

Diharapkan melalui studi penelusuran nilai-nilai pedagogik yang terkandung dalam lontaraq *pappasêng/pappasang* dapat kembali diajarkan

melalui *local content* pada pembelajaran IPS di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Pada kurikulum IPS SMP banyak ditemukan Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai pedagogik yang terkandung dalam lontaraq. Pengembangan pembelajaran IPS di SMP dengan memanfaatkan nilai pedagogik dalam lontaraq sebagai bahan ajar akan memberikan manfaat yang besar pada peserta didik.

Kelas VII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Memahami kehidupan sosial manusia	2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial 2.2 Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian 2.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial 2.4 Menguraikan proses interaksi sosial

Kelas VIII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami masalah penyimpangan sosial	3.1 Mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/AIDS, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat 3.2 Mengidentifikasi berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat

Dalam kurikulum 2013, guru dalam membelajarkan mata pelajaran IPS harus mengacu pada prinsip *integrated social studies*. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS harus mendukung pencapaian Kompetensi Inti, yakni KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Pelaksanaannya di lapangan KI 1 dan KI 2 sebenarnya tidak secara eksplisit diajarkan di kelas. Adapun yang diajarkan secara eksplisit adalah KI 3 dan KI 4. Diharapkan dalam pencapaian KI 3 dan KI 4 maka KI 1 dan KI 2 dengan sendirinya juga otomatis akan dicapai (Mulyasa, 2013: 177-178).

Kompetensi Inti (KI) Pelajaran IPS SMP Kelas VII dalam Kurikulum 2013	
KI 1	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI 3	Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4	Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Berbagai nilai dalam lontaraq *pappasêng/pappasang* yang kaya akan nilai-nilai pedagogik dapat memberikan kontribusi guna pengembangan input dalam penguatan nilai lokal perangkat pembelajaran IPS di sekolah. Hal ini memberikan peluang proses pembelajaran yang bercirikan etnopedagogi berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diterapkan pada sekolah-sekolah SMP yang ada di Sulawesi Selatan.

Akibat dari input yang memuat nilai-nilai lokal yang diimplementasikan pada pembelajaran yang bercirikan etnopedagogi dapat menghasilkan output berupa rancangan perangkat pembelajaran yang memiliki muatan etnopedagogi dalam bahan ajar IPS di SMP. Atas dasar pertimbangan di atas, penulis memilih topik penelitian Studi Penelusuran Nilai-Nilai Pedagogi pada Naskah Lontaraq sebagai Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan IPS di Sekolah (Etnopedagogi Etnik Bugis Makassar).

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti nilai-nilai pedagogi pada masyarakat Bugis Makassar yang terdapat di dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang* sebagai pengembangan bahan ajar IPS di sekolah. Permasalahan yang diketengahkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pedagogi apa saja yang terdapat dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang*?
2. Apa keunggulan lontaraq *pappasêng/pappasang*, sehingga baik dan tepat untuk dijadikan sebagai kajian etnopedagogi dalam pembelajaran IPS?
3. Bagaimana keberlangsungan pewarisan nilai-nilai dalam lontaraq *pappasêng/pappasang* terhadap generasi muda Bugis Makassar saat ini?
4. Bagaimana mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai pedagogi dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang* pada pembelajaran IPS di SMP?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis nilai-nilai pedagogik yang terdapat dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan keunggulan nilai-nilai pedagogi yang terkandung dalam lontaraq *pappasêng/pappasang*, sehingga baik dan tepat dijadikan sebagai kajian etnopedagogi dalam pembelajaran IPS.
3. Untuk mendeskripsikan proses pewarisan nilai-nilai dalam lontaraq *pappasêng/pappasang* terhadap generasi muda Bugis Makassar saat ini.
4. Untuk menemukan cara-cara yang tepat dalam mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai pedagogi pada naskah lontaraq *pappasêng/pappasang* pada pembelajaran IPS di SMP.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan :

1. **Secara teoretis**

Kajian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial terutama menyangkut nilai-nilai pedagogi masyarakat yang multikultur di seluruh Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan kajian bagi pengembang kurikulum Pendidikan IPS dalam mengembangkan program pembelajaran IPS yang sumber materinya berasal dari kekayaan nilai budaya Bugis Makassar.
- b. Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi praktisi Pendidikan IPS dalam upaya pencapaian tujuan Pendidikan IPS melalui pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang* pada pembelajaran Pendidikan IPS.
- c. Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi ahli Pendidikan IPS dalam mengembangkan paradigma pembelajaran IPS yang sumbernya diangkat dari nilai budaya Bugis Makassar yang terdapat dalam lontaraq *pappasêng/pappasang*.
- d. Sebagai bahan input bagi komunitas masyarakat Bugis Makassar dalam upaya transformasi nilai tradisi Bugis Makassar melalui proses pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan yang ada.
- e. Dapat dijadikan bahan studi bagi penentu kebijakan bidang pendidikan dan pengembangan program pendidikan di tingkat pusat akan urgensi pengintegrasian dan penginternalisasian nilai tradisi masyarakat lokal dalam kurikulum pendidikan, khususnya kurikulum Pendidikan IPS di sekolah-sekolah.
- f. Dapat memberikan sebuah rekomendasi berupa kerangka konseptual internalisasi nilai-nilai pedagogi masyarakat Bugis Makassar yang terkandung dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang* dalam proses pembelajaran guru IPS di sekolah dan dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

5. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi ini terdiri atas lima bab. Bab pertama sebagai pengantar, berisi hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian; identifikasi masalah dan perumusan masalah; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian; serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi uraian etnopedagogi: pendidikan berbasis kearifan lokal; pendidikan dan pewarisan nilai: proses transformasi dan konservatori; pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai, yang terbagi atas: tujuan pendidikan IPS, nilai dalam pendidikan IPS, naskah kuno sebagai sumber nilai; hermeneutika dan fenomenologi: dimensi metodis penelusuran makna dan nilai; semiotika dan analisis wacana: upaya memaknai kandungan naskah lontaraq; dan relevansi penelitian sebelumnya.

Bab tiga berisi uraian: lokasi dan subyek penelitian; metode penelitian; sumber data penelitian; teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi; pemeriksaan dan keabsahan data; dan teknik analisis data, yang terdiri dari analisis isi dan analisis domain.

Adapun bab empat berisi uraian: A) deskripsi hasil penelitian: 1) gambaran umum kondisi sosial budaya masyarakat, a) wilayah hunian komunitas Bugis Makassar, b) bahasa, kesusastraan, dan aksara, c) falsafah hidup, d) sifat dan karakter, e) sistem norma, f) sistem kekerabatan, g) stratifikasi sosial; 2) pendidikan tradisional; B) paparan temuan data: a) nilai-nilai pedagogik dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang*, b) keunggulan yang terdapat dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang*, c) pewarisan nilai dalam masyarakat Bugis Makassar, d) pengintegrasian nilai-nilai *pappasêng/pappasang* ke dalam pembelajaran; C) pembahasan: a) nilai-nilai pedagogik yang dapat dimasukkan dalam muatan lokal IPS di sekolah yang terdapat dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang*, b) keunggulan yang terdapat dalam naskah lontaraq *pappasêng/pappasang* sebagai kajian etnopedagogi dalam pembelajaran IPS, c) pewarisan nilai-nilai dalam tradisi Bugis Makassar kepada generasi muda, yang terdiri dari uraian: kondisi pewarisan nilai-nilai lontaraq *pappasêng/pappasang* pada masyarakat Bugis Makassar di masa kini dan pewarisan nilai pada keluarga

Bugis Makassar, d) internalisasi dan pengintegrasian nilai-nilai luhur lontaraq *pappasêng/pappasang* ke dalam pembelajaran IPS.

Bab lima sebagai bab penutup, berisi uraian kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Adapun dalam saran-saran ditujukan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, dan peneliti selanjutnya, serta untuk masyarakat umum. Juga berisi dalil-dalil penelitian.